

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Tujuan setiap negara adalah kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang ada di dalamnya begitu juga negara Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu masalah paling besar yang dihadapi setiap negara. Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, sehingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.

Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan fenomena *multiface* atau *multidimensional*.

Dikutip dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Undang-undang ini mengatur tentang kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial setiap warga Indonesia. Undang-undang ini bertujuan agar warga Indonesia dapat hidup dengan layak. Undang-undang ini juga mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa negara dan memajukan kesejahteraan sosial.

Tapi kenyataan nya sampai sekarang tidak semua masyarakat Indonesia yang merasakan kesejahteraan sosial. Ada beberapa tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, antara lain: Kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, Perlindungan sosial

yang belum maksimal. Masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup didalam angka kemiskinan.

Ada beberapa kebijakan sosial dari pemerintah untuk berupaya menurunkan kesenjangan sosial, misalnya: membuka banyak lowongan kerja dan juga memberikan berbagai macam bantuan sosial seperti: Bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), Program sembako dan masih banyak lagi. Tapi, disini penulis lebih menerangkan kepada program pemerintah bantuan langsung tunai.

Bantuan Langsung Tunai adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yakni dengan cara memberikan bantuan uang secara tunai sebesar Rp.300.000,- setiap bulan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin. Salah satu sumber dana yang digunakan oleh pemerintah ntuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat adalah dengan menggunakan Dana Desa (DD).

Konsep pembagian bantuan langsung kepada masyarakat miskin bukanlah hal baru, tetapi hasil dan bentuknya telah berevolusi seiring waktu. Berbagai bentuk bantuan sosial telah ada, mulai dari program-program amal hingga intervensi pemerintah yang lebih terstruktur. Namun, program BLT umumnya muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi atau sebagai bagian dari strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dukungan finansial langsung

kepada individu atau rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau yang terdampak oleh peristiwa-peristiwa tertentu, seperti bencana alam atau pandemi.

Meskipun BLT memiliki tujuan yang sangat baik, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan, seperti masalah korupsi, penyaluran yang tidak tepat sasaran, dan efektivitas jangka panjang program. Adanya BLT Desa ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian di tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari. Adapun Fenomena masalah yang penulis angkat yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan program bantuan langsung tunai dikarenakan informasi tentang program bantuan langsung tunai yang disediakan oleh petugas masih kurang jelas. Dikarenakan dari pemerintah Desa tidak menyediakan media informasi seperti brosur, pamflet, maupun baliho. Pemerintah Desa juga tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa pemilihan penerima pada program bantuan langsung tunai dan pemerintah Desa juga tidak mengadakan sosialisasi tentang program bantuan langsung tunai untuk masyarakat

sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat tentang program bantuan langsung tunai.

2. Ada beberapa penerima program bantuan langsung tunai yang tidak mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi nya dikarenakan banyak nya penerima program adalah orang tua yang lanjut usia. Berdasarkan data penerima tahun 2026, masih ada sekitar 24 orang yang menjadi penerima bantuan langsung tunai, jadi masih lumayan banyak penerima bantuan langsung tunai yang tidak mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi walaupun sudah menerima bantuan langsung tunai dalam beberapa tahun kebelakang.
3. Adanya keterlambatan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program bantuan langsung tunai hingga sekitar tiga bulan di awal tahun, karena anggaran dana dari pemerintah terlambat diterima oleh pemerintah desa, keterlambatan tersebut mengakibatkan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima tidak dapat segera memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Padahal, BLT merupakan program yang bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

Dengan adanya 3 fenomena masalah yang terjadi pada Program Bantuan Langsung Tunai didesa Pulau Tambak, jadi penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA PULAU TAMBAK KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

## **B. Fokus penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) demi kesejahteraan Di Desa Pulau Tambak Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. penelitian ini memfokuskan ke beberapa aspek efektivitas Menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018:43) yaitu:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

## **C. Rumusan masalah**

Ada beberapa yang menjadi rumusan masalah efektivitas program bantuan langsung tunai (BLT) bagi kesejahteraan masyarakat miskin di desa Pulau Tambak, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Pulau Tambak Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pulau Tambak Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

#### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis, maka penulis menentukan yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui bagaimana Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pulau Tambak Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pulau Tambak Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

##### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan dalam dunia akademis pada jurusan Administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan manajemen publik pada lembaga pelayanan publik milik pemerintah di bidang sosial.

##### **b. Secara Praktis**

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh

penulis selama mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik STIA Amuntai. Selain itu, peneliti berharap karya ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi siapa saja yang membaca dan menjadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

